

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat kontribusi industri pemesinan di DIY dalam upaya revitalisasi SMK, secara keseluruhan masuk dalam kategori “sangat rendah” dengan ketercapaian skor sebesar 42,67%.
 - a. Tingkat kontribusi industri pemesinan di DIY dalam upaya revitalisasi SMK pada klaster industri besar masuk dalam kategori “rendah” dengan ketercapaian skor sebesar 55,33%.
 - b. Tingkat kontribusi industri pemesinan di DIY dalam upaya revitalisasi SMK pada klaster industri menengah masuk dalam kategori “sangat rendah” dengan ketercapaian skor sebesar 41%.
 - c. Tingkat kontribusi industri pemesinan di DIY dalam upaya revitalisasi SMK pada klaster industri kecil masuk dalam kategori “sangat rendah” dengan ketercapaian skor sebesar 34,8%.
2. Faktor penghambat industri pemesinan yang paling dominan dalam melakukan langkah-langkah revitalisasi SMK sebagai berikut.
 - a. Keterbatasan SDM di industri untuk melakukan kerjasama *link and match*
 - b. Rendahnya koordinasi dan komunikasi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Prakerin

- c. Kurangnya pendanaan dari sekolah yang mengakibatkan rendahnya partisipasi guru dalam program magang guru.
 - d. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana industri untuk melaksanakan program kelas industri dan mayoritas industri di DIY masuk dalam kategori industri mikro, kecil dan menengah sehingga belum dapat melaksanakan program kelas industri.
 - e. Waktu dan penyesuaian jadwal kegiatan pengembangan kurikulum
 - f. Kualitas dan kuantitas peralatan rendah sehingga belum mampu memenuhi standar kualitas dan target waktu yang diinginkan industri dalam rangka melaksanakan program *teaching factory*.
3. Faktor pendukung industri pemesinan yang paling dominan dalam melakukan langkah-langkah revitalisasi SMK sebagai berikut.
- a. MoU/kesepahaman/perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan
 - b. Siswa Prakerin dapat membantu pekerja di industri
 - c. Dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah pada program magang guru
 - d. (Program kelas industri belum terlaksana)
 - e. Hubungan, kedekatan personal dan komunikasi yang baik (formal & informal) pada program pengembangan kurikulum
 - f. Kapasitas produksi di industri yang cukup besar untuk melaksanakan program *teaching factory*.

B. Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi pembuat kebijakan, industri dan SMK dalam meningkatkan upaya revitalisasi SMK.

2. Faktor penghambat upaya revitalisasi SMK yang telah digali pada penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan solusi dalam meningkatkan upaya revitalisasi SMK.
3. Faktor pendukung upaya revitalisasi SMK yang telah digali pada penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan, langkah, dan strategi yang harus didorong agar upaya revitalisasi SMK semakin meningkat.

C. Saran

1. Aspek kerjasama *link and match*:
 - a. Komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak SMK dan pihak industri perlu ditingkatkan baik secara formal (Nota kesepahaman/MoU/naskah perjanjian kerjasama) maupun secara informal (hubungan personal dan jaringan alumni).
 - b. Pihak industri diharapkan menanamkan semangat dan kesadaran pada seluruh SDM bahwa industri ikut bertanggungjawab pada pengembangan SMK dan membutuhkan lulusan SMK yang kompeten sebagai kader pembangunan bangsa.
 - c. SMK diharapkan secara aktif menjajaki kerjasama dengan industri sebanyak-banyaknya khususnya industri besar dan menengah.
 - d. Industri diharapkan semakin membuka peluang kerjasama sebesar-besarnya dengan SMK mengingat dukungan pemerintah yang cukup besar.
 - e. Pemerintah diharapkan terus mendorong dan melakukan mediasi antara SMK dan industri dalam menjalin kerjasama.

- f. Pihak sekolah merasa kesulitan untuk mencari asesor eksternal untuk uji kompetensi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu meningkatkan jumlah asesor eksternal dari industri melalui pelatihan dan sertifikasi serta pemetaan dan pendistribusian asesor yang dikelola dinas terkait.
 - g. Kedisiplinan dan ketertiban siswa SMK harus selalu ditingkatkan agar mereka siap saat berkunjung ke industri.
 - h. Pemerintah melalui dinas pendidikan perlu memberikan bantuan peralatan praktik untuk SMK khususnya mesin produksi agar kuantitasnya mencukupi untuk proses uji kompetensi sekaligus proses belajar mengajar.
2. Aspek program praktik kerja industri:
- a. Komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak SMK dan pihak industri perlu ditingkatkan baik secara formal (Nota kesepahaman/MoU/naskah perjanjian kerjasama) maupun secara informal (hubungan personal dan jaringan alumni).
 - b. SMK diharapkan menjalin kerjasama Prakerin dengan industri sebanyak-banyaknya, mengingat jumlah industri yang memenuhi kualifikasi atau layak sebagai tempat Prakerin di DIY sangat terbatas. Jika diperlukan SMK dapat bekerjasama dengan industri besar di luar DIY.
 - c. SMK perlu meningkatkan intensitas *monitoring* siswa Prakerin minimal 1 bulan sekali sehingga terjadi komunikasi yang baik antara pihak industri dan SMK dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan prakerin.
 - d. Sekolah dan industri diharapkan melakukan kegiatan *workshop* perencanaan program Prakerin demi tercapainya tujuan kegiatan yang

meliputi perencanaan kompetensi yang akan diajarkan, koordinasi jadwal dan durasi prakerin.

- e. Sekolah dan industri diharapkan melakukan koordinasi dan merencanakan proses penilaian dan evaluasi Prakerin secara bersama-sama.
 - f. SMK diharapkan memastikan bahwa siswa menguasai keterampilan dasar yang diperlukan saat Prakerin. Jika memungkinkan, SMK dapat melakukan bimbingan khusus pra-Prakerin.
 - g. Bagi industri, *hard skills* harus diimbangi dengan *soft skills*. Diharapkan SMK terus mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan *soft skills* siswa SMK.
 - h. Pemerintah diharapkan membuat regulasi dan memberikan kepastian payung hukum terkait jaminan K3 bagi peserta Prakerin.
 - i. Dinas perindustrian perlu melakukan pelatihan metode pembelajaran berbasis kompetensi kepada instruktur industri mengingat pihak industri mengatakan bahwa mereka kurang memahami cara menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada siswa Prakerin.
 - j. Industri diharapkan terus memupuk semangat dan kesadaran SDM dalam membimbing siswa Prakerin agar kompetensinya meningkat sehingga dapat membantu menyelesaikan pekerjaan.
3. Aspek program magang guru:
- a. Komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak SMK dan pihak industri perlu ditingkatkan baik secara formal (Nota kesepahaman/MoU/naskah perjanjian kerjasama) maupun secara informal.

- b. SMK diharapkan juga memprioritaskan anggaran untuk program pengembangan salah satunya magang guru.
 - c. Perlu adanya payung hukum terkait status guru yang melakukan magang di industri karena kegiatan magang guru terbentur oleh regulasi sertifikasi yang mengharuskan guru harus mengajar penuh dalam seminggu.
- 4. Aspek program kelas industri:
 - a. Pemerintah diharapkan menjadi mediator dalam kerjasama SMK dengan industri dalam bentuk kegiatan *workshop*, diskusi dan perencanaan pembentukan kelas industri yang dirasa sangat sulit dilakukan khususnya pada Kompetensi Teknik Pemesinan.
- 5. Aspek pengembangan kurikulum:
 - a. Komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak SMK dan pihak industri perlu ditingkatkan baik secara formal (Nota kesepahaman/MoU/naskah perjanjian kerjasama) maupun secara informal (hubungan personal dan jaringan alumni).
 - b. Industri diharapkan dapat mengirimkan delegasi yang mumpuni untuk membantu pengembangan kurikulum SMK.
 - c. Pada proses pengembangan kurikulum, SMK diharapkan secara aktif melakukan identifikasi pekerjaan di industri agar kompetensi yang akan di ajarkan semakin relevan. Hal ini dilakukan karena perbedaan cara pandang industri dengan SMK dalam pengembangan.
- 6. Aspek program *teaching factory*:

- a. Komunikasi dan hubungan yang baik antara pihak SMK dan pihak industri perlu ditingkatkan baik secara formal (Nota kesepahaman/MoU/naskah perjanjian kerjasama) maupun secara informal (hubungan personal dan jaringan alumni) khususnya pada industri yang berbasis produksi massal.
- b. Pemerintah melalui dinas pendidikan perlu memberikan bantuan peralatan praktik untuk SMK khususnya mesin produksi agar kuantitasnya mencukupi agar dapat memenuhi standar kualitas dan standar waktu yang ditargetkan oleh industri sebagai rekan kerjasama *teaching factory*.
- c. SMK diharapkan membentuk manajemen UPJ yang profesional dengan membentuk organisasi khusus karena saat ini UPJ masih dikelola oleh guru yang disisi lain memiliki tugas mengajar secara penuh sehingga kurang dapat mengelola secara maksimal.
- d. Perlu payung hukum yang mengatur UPJ agar SMK Negeri dapat melakukan tata kelola keuangan dengan baik mengingat peralatan yang digunakan untuk proses produksi milik negara.